

## INTISARI

**Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1572/K/Pdt/2015 Tentang Sebab Batal Demi Hukum Perjanjian Pinjam Meminjam Antara PT Bangun Karya Pratama Lestari Dengan Nine Am Ltd Di Tinjau dari Ketentuan Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Dan Pasal 1338 KUHPERDATA**

Oleh:

**Roy Romulus<sup>1</sup> dan Djoko Sukisno<sup>2</sup>**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa terdapat suatu batasan – batasan dalam penerapan Pasal 1338 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata untuk membuat suatu Perjanjian salah satunya adalah Pasal 31 ayat (1) Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2009 dalam kesimpulannya menyatakan adanya kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia dalam suatu Perjanjian.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, maka jenis data yang digunakan adalah data sekunder (*secondary data*). Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif.

Hasil Penelitian ini menerangkan bahwa batal demi hukum (*van rechtswege nietig atau van een overeenkomst*) merupakan suatu keadaan di mana suatu syarat objektif dari syarat-syarat sah perjanjian tidak dipenuhi sehingga secara yuridis dari semula dianggap tidak ada suatu perjanjian dan tidak ada pula suatu perikatan antara orang-orang yang bermaksud membuat perjanjian itu. Adapun, syarat objektif dari syarat- syarat sah perjanjian adalah syarat-syarat yang berkaitan dengan objek perjanjian itu, yang mensyaratkan objek perjanjian itu mengenai suatu hal tertentu dan suatu sebab (*causa*) yang halal. Bahwa seharusnya ada pertimbangan hakim yang menunjukkan bahwa agar perjanjian ditulis dalam bahasa yang dimengerti dan dipahami oleh pihak yang berkontrak. Hal ini karena tujuan hukum adalah menjamin kepastian (ketertiban) dan menciptakan keadilan. Seharusnya sudah dapat dibuktikan bahwa para pihak telah melaksanakan kewajiban dan menerima hak nya sesuai kesepakatan kerjasama yang telah disepakati. Seharusnya hakim melihat bahwa pelaksanaan perjanjian tersebut apakah didasari oleh itikad baik dari para pihak atau ada tujuan lain dari salah satu pihak agar menghindari untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan apa yang telah disepakati.

**Kata Kunci:** Asas Kebebasan Berkontrak, kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia,

---

<sup>1</sup> Peneliti Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia, tinggal di Jakarta

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum UGM

## ABSTRACT

*Juridical Analysis Against the Ruling of The Supreme Court of Indonesia Number 1572/K/Pdt/2015 About the Reason of The Loan Agreement Null and Avoid by Law Between PT Bangun Karya Pratama Lestari with Nine AM Lt in review of the provisions of article 31 paragraph (1) of Law No. 24/2009 and section 1338 Indonesian Civil Code*

By:  
**Roy Romulus<sup>3</sup> and Djoko Sukisno<sup>4</sup>**

*This research aims to find out that there is a limitation in applying restrictions – Article 1338 book of Law – Civil Law Legislation to create an agreement, one of which is article 31 paragraph (1) of Law No. 24 of 2009 in the conclusion stated the existence of the liability of the use of the Indonesian Language in an agreement.*

*This research uses the normative legal research methods used in this research, then the type of the data to be used are secondary data and analysis method data used in this research was qualitative in nature, i.e. the results of the analysis are not hung on in terms of the number of data and because of a change of law occurs does not depend on the amount of and events.*

*The results of this study explained that annulled by law (van rechtswege or van een overeenkomst nietig) is a State in which an objective requirement of the terms of the legal agreement is not met so that legally from the beginning is not considered There is an agreement and there is also an alliance between people who intend to make a promise. As for the objective, the terms of the terms of the legal agreement are terms relating to the object of the Treaty, which requires the object of the Covenant concerning a particular thing and one reason (causa) which is lawful. That there should be consideration of the judge that indicates that in order that the agreement be written in language that is understandable and understood by the parties to the contracts.*

*This is because the purpose of the law is the guarantee of certainty (order) and creates justice. It should already be demonstrated that the parties have executed the obligations and receive his rights according to agreement of cooperation agreed upon. Should the judges see that the implementation of the agreement is based on the good faith of the parties or any purpose other than to avoid one party to meet its obligations in accordance with what has been agreed upon.*

**Keywords:** *Freedom of Contract, the obligation of use of Indonesia*

---

<sup>3</sup> Obligation to use the Indonesian Language in an Agreement Research, living in Jakarta

<sup>4</sup> Lecturer at law of Faculty Gadjah Mada University, Jogjakarta